

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia berada dalam kawasan cincin api atau *Ring of fire*, yaitu istilah yang digunakan untuk wilayah yang sering mengalami letusan gunung berapi aktif dan gempa bumi. Indonesia merupakan wilayah sangat berpotensi tinggi terjadinya gempa bumi karena posisinya dipertemuan tiga lempeng utama dunia, yakni lempeng eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng pasifik. Gempa bumi yang disebabkan oleh lempeng bumi terjadi jika lempeng ini bergeser, pecah atau bahkan mencuat keatas. Jadi secara geografis, Indonesia termasuk sebagai wilayah yang rawan terhadap berbagai kejadian bencana alam yang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi seperti yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 yang lalu. Bencana yang terjadi di Indonesia khususnya Lombok telah menimbulkan keperihatinan semua lapisan masyarakat terkhususnya pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pencegahan ataupun penanganan setelah terjadinya bencana. Sejak dua tahun berlalu gempa berkekuatan 7.0 SR yang melanda Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 29 Juli 2018 masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Lombok Utara. Kepulauan Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok secara tektonik memang kawasan seismik aktif. Lombok menjadi wilayah yang rawan terhadap potensi diguncang bencana gempa bumi karena Lombok terletak diantara pembangkit gempa dari selatan dan utara. Sebelah selatan terdapat zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam kebawah Pulau Lombok, dari sebelah utara

terdapat struktur geologi Sesar Naik Flores, yang jalurnya memanjang dari laut Bali ke timur hingga Flores, dari pada itu Pulau Lombok memang rawan gempa jalur sesar naik Flores (Tim Seismologi Teknik BMKG, 2018). Sejalan dengan Lewerissa dalam Wekke menjelaskan bahwa Gempa bumi yang menghantam Pulau Lombok disebabkan oleh lempeng tektonik Australia yang bergerak ke barat laut sampai ke utara (Wekke, 2019).

Semua Desa di Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam kategori memiliki ancaman tinggi terhadap gempa bumi. Hal ini juga didukung oleh kondisi struktur geologi Pulau Lombok. Daerah Kabupaten Lombok Utara, meskipun tidak berada langsung di zona tumbukan lempeng besar seperti di Lombok bagian Selatan, tapi tumbukan pada lempeng besar tersebut juga akan bisa memicu getaran pada daerah Back Arc (Busur Belakang) dimana lokasi Kabupaten Lombok Utara menurut tatanan tektoniknya. Dampak dari gempa di Lombok Utara menyebabkan sebanyak 537 jiwa meninggal dunia, 101.735 jiwa mengungsi, hampir 76 ribu bangunan rumah mengalami rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan, selain itu, berbagai fasilitas ekonomi (pasar, pertokoan, perhotelan dan akomodasi lainnya), fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu.

Untuk penanggulangan pasca bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 telah menyebutkan bahwa penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pemerintah Pusat dan Daerah sebab Pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan Penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Dalam penanggulangan pasca bencana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 10 bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi berupa perbaikan dan pemulihan

dari berbagai aspek yang terdampak. Dengan demikian baik Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap pemulihan pasca bencana. Pemulihan pasca bencana menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan manajemen kebencanaan yang ada di Indonesia. Manajemen bencana gempa bumi terdiri dari dua kegiatan, (1) Pra bencana dan (2) Pasca bencana. Kegiatan pra bencana meliputi kesiapsiagaan, pendidikan kesadaran risiko, pelatihan, perencanaan tata ruang, dan desain struktur tahan bencana. Kegiatan pasca bencana, mencakup, antara lain, respons bencana/tanggap darurat, serta pemulihan bencana. (Kholil, 2019).

(Army, 2015) berpendapat proses pemulihan telah menjadi salah satu langkah penting yang harus diimplementasikan setelah bencana terjadi. Senada dengan (Ziqiang Han, 2017) pemulihan bencana dapat dikonseptualisasikan sebagai proses diferensial memulihkan, membangun kembali, dan membentuk kembali lingkungan fisik, sosial ekonomi dan alam melalui perencanaan dan tindakan pasca terjadinya bencana. Pemulihan bencana bisa menjadi peluang untuk pemerintah dalam membangun daerah agar lebih baik dan dapat bertahan pada resiko bencana yang lebih besar pada waktu mendatang. Proses pemulihan tersebut disebut sebagai fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Lombok adalah daerah yang berupa pulau yang berada dibagian barat Kepulauan Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB). Provinsi yang memiliki sepuluh kabupaten dan beribu kota dimataram. Pulau lombok berluaskan 5,435 kilometer persegi dan dikenal dengan sebutan pulau seribu masjid. Terdapat lebih dari 3,767 masjid besar dan 5,184 masjid kecil yang tersebar di 518 desa di lombok (Suara.com, 2019). Selain itu, Lombok juga terkenal akan destinasi pariwisatanya. Pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini di gadang-gadang menjadi salah

satu objek wisata yang menyaingi popularitas Bali. Spot destinasi wisata lain yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berlibur di Lombok adalah Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Air Terjun Kerta Gangga, dan tentunya Gunung Rinjani (Pratiwi,2018).

Lombok menjadi daerah wisata yang tidak hanya terkenal dikalangan wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara sebagai andalan pariwisata untuk menggerakkan perekonomian daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari data anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 60% berasal dari sektor pariwisata. Capaian PAD ini menunjukkan bahwa industri pariwisata adalah penggerak utama perekonomian NTB. Mengingat Lombok adalah daerah destinasi wisata yang menjadi unggulan, baik level lokal maupun mancanegara, maka sektor pariwisata harus menjadi salah satu sasaran pemulihan utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pascabencana agar Lombok mampu bangkit dari keterpurukan pascabencana. Hal ini menjadi penting karena destinasi wisata Lombok merupakan salah satu faktor penyumbang PAD yang cukup besar. Pembangunan infrastruktur pendukung dan citra merupakan beberapa hal yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lombok Utara.

Citra merupakan kesan atau penilaian yang diberikan oleh publik terhadap sebuah perusahaan, instansi, ataupun organisasi yang dilihat dari kondisi obyektif yang kemudian bisa berbentuk penilaian positif ataupun negatif dan akan berpengaruh terhadap tingkat loyalitas publik terhadap instansi yang bersangkutan. Citra tempat wisata yang berujung pada minat wisatawan untuk singgah lebih lama tak lepas dari kondisi obyek yang dijual dan kemasan obyek wisata tersebut. Kontes citra wisata

disini, Lombok memiliki kemampuan wisata yang besar. Kekuatan tersebut terletak pada destinasi wisata berupa laut, pantai, gunung, pulau, dan kebudayaan Lombok yang lain.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Lombok Utara Dalam Pemulihan Citra Wisata Alam, Pasca Gempa Bumi 2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara dalam pemulihan citra wisata alam pasca gempa bumi 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara dalam pemulihan citra wisata alam pasca gempa bumi 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan kedepannya menambah pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca pada umumnya dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa khususnya Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan menjadi bahan rujukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara dalam upaya pengembalian citra wisata pasca gempa bumi tahun 2018.

1.5.Kajian Pustaka

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Strategi Komunikasi Pemasaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Pasca Gempa Lombok	SriHermalia Wulandari (2018)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca gempa 2018 Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat melakukan proses perencanaan strategi komunikasi melalui 4 langkah yakni Analisis Sasaran Komunikasi, Strategi Pesan, Menetapkan Metode dan Pemilihan Media. Dalam promosi destinasi juga Dinas Pariwisata menekankan aspek Branding, Advertising dan Selling.
2.	Komunikasi pemerintah daerah dalam program pembangunan daerah wisata pantai pasca bencana	S. Bekti Istiyanto (2011)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar atas sikap pemerintah daerah khususnya dalam pelibatan masyarakat dalam proses komunikasi pembangunan terkait dengan penyikapan menangani bencana yang melanda kawasan wisata pantai.
3.	Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)	Marceilla Hidayat (2011)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pihak-pihak yang kompeten dan berpengalaman dibidang pariwisata seperti diving centre, travel, hotel, akademisis dalam pengembangan pemahaman, komunikasi dan edukasi pembangunan pariwisata bahari.
4.	Perumusan Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Lalu M. Furqan (2018)	Penelitian ini membahas strategi yang direkomendasikan dari penelitian ini bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan,

	Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Pantai Selatan Lombok Tengah		Integrasi ke depan, Penetrasi pasar, diversifikasi konsentrik, dan Pengembangan produk
5.	Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menarik Minat Pengunjung Objek Wisata Pantai Solop	Veni Fitra Meilisa (2018)	Hasil penelitian ini adalah; bahwa strategi komunikator dilakukan oleh Departemen Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan kabupaten Indragiri Hilir memiliki empat tahap, yaitu perencanaan, Proposal pengesahan, persiapan teknis, dan implementasi program dan pilih komunikator yang memiliki kredibilitas dan pengetahuan.
6.	Implementasi Strategi Pada Pengembangan Wisata Dieng Kabupaten Banjarnegara	Nurlaili Restiana (2017)	Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata Dieng di Kabupaten Banjarnegara secara umum sudah berjalan dengan cukup baik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu program, sumber daya, dan prosedur.
7.	Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar Dalam Pengembangan Kepariwisataaan Guna Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Ardian Wahyu (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah pengembangan objek wisata, promosi pariwisata, pembinaan usaha pariwisata dengan membuat asosiasi wisata desa.

8.	Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias.	Elielsen Lase (2018)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam menjalankan strategi pengembangannya Dinas Pariwisata Kabupaten Nias memiliki faktor pendorong dan penghambat. Untuk faktor pendorong didukung oleh letak geografis SOZIONA yang sangat strategis dan indah. Untuk faktor penghambat sendiri adalah kondisi ekonomi.
9.	Strategi Penataan Kawasan Pantai Klayar Pacitan Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dengan Prinsip Arsitektur Ekologis	Sri Yuliani (2018)	Pertimbangan rawan bencana yang menjadi kendala spesifik lokasi merupakan batasan yang penting agar terbangun penataan pariwisata yang aman dan tanggap bencana sehingga aman dan nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan. Penataan diprioritaskan pada prinsip-prinsip arsitektur ekologis yang ramah lingkungan.
10.	Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sulthon Rohmadin (2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan berupa aspek-aspek yang memengaruhi pariwisata di Kabupaten Ende. Analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi bertujuan untuk mengetahui isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts, Weaknes, Opportunities, Threats).
11	Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuhan Cermin Di Kabupaten Berau	Nita Bonita (2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari prasarana dan sarana yang ada di kawasan wisata Labuan Cermin termasuk didalamnya aksesibilitas,amenitas,danatraksi.

12	Strategi Pengembangan Pariwisata Pasca Gempa Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Obyek Wisata di Kabupaten Lombok Utara	Akmaludin, Eka Askafi (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian Rencana Pengembangan kawasan Perumahan dan Permukiman Pasca Gempa di Kawasan wisata Desa Malaka, merupakan pengembangan kawasan strukturisasi dan permukiman berbasis pariwisata.
13	PEMULIHAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI LOMBOK UTARA PADA TAHUN 2018	Heru Kusuma bhakti, Ahmad Nurmandi (2020)	Hasil menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan melalui 5 aspek utama yaitu Sektor Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, Pemukiman serta Lintas Sektor.
14	EXPOSURE BERITA TERHADAP MINAT PARIWISATA LOMBOK PASCA GEMPA	Gusmia Arianti (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpaan berita pada media massa televisi mengenai pariwisata Lombok pasca terjadinya gempa di bulan Agustus 2018 lalu memberikan pengaruh signifikan positif terhadap minat kunjungan masyarakat ke Lombok. Televisi dirasa memainkan peranan penting dalam penyebaran informasi. Hal ini sesuai dengan teori uses and effect, dimana kebutuhan akan informasi akan mempengaruhi perilaku penerima informasi.
15	PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA TELUK TRITON KABUPATEN KAIMANA	Fauziah Hanum Ladia, Afifuddin, Agus Zainal Abidin (2020)	Obyek Wisata Teluk Triton ini ternyata masih mengalami faktor penghambat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain : Rencana pengembangan kawasan Teluk Triton belum optimal dan terarah, keterbatasan sumber daya aparatur Pariwisata dalam segi jumlah dan keahlian, penyediaan sarana prasarana yang belum memadai, keadaan geografis dan kondisi alam serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kepariwisata

	PROVINSI PAPUA BARAT		
16	PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SANGIHE	Alvinita Hamel, Martha Ogotan, Femmy Tulusan (2017)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran budaya dan pariwisata dalam pengembangan objek wisata didasarkan pada tiga indikator yaitu koordinator, fasilitator, stimulator dan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata yaitu Penyediaan Rencana Induk Kepariwisataaan. Pengembangan Kawasan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan kerjasama antara instansi Pemerintah, Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan objek wisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia wisata.
17	Peran dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten temanggung dalam pengembangan objek wisata	Dewi fitria anggraeni, fadlurrahman (2018)	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata telah dijalankan sesuai dengan teori Pitana dan Gayatri (2005) mengenai peran Pemerintah Daerah yang terdiri dari motivator, fasilitator, dan dinamisator meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena masih ada kendala atau hambatan yaitu Anggaran, SDM (Sumber Daya Manusia), SDA (Sumber Daya Alam), kurangnya promosi, kurangnya investor dan regulasi.
18	Peran dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bogor dalam pengembangan ekowisata di kabupaten bogor	Rahayuningsih, T. and Muntasib, E.H. 2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas telah berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekowisata Kabupaten Bogor, dan menjalin kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, kebijakan Badan tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan ekowisata Kabupaten Bogor.
19	Peran dinas pariwisata dan kebudayaan	Rasid, Rano (2018)	Kesimpulan penelitian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam

	<p>kabupaten kepulauan anambas dalam pengembangan obyek wisata. peran dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kepulauan anambas dalam pengembangan obyek wisata.</p>		<p>mengembangkan objek wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas..</p>
20	<p>Peran dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang dalam promosi wisata candi (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang)</p>	<p>Laely Harum Puspitasari, Afifuddin Afifuddin, Suyeno Suyeno (2019)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam Promosi Wisata Candi yaitu Dispubud mempunyai peran utama dalam promosi, promosi yang dilakukan menggunakan Bilodeline (Brousur, Buku dan pamflet) kemudian Bofdeline (media massa:koran media elektronik:tv dan radio). Melakukan sosialisasi workshop dan pelatihan-pelatihan serta terjun langsung ke lokasi yang ingin dituju. (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Promosi Wisata Candi yaitu: Faktor pendukung, adanya kegiatan pameran dan promosi wisata di dalam negeri dan di luar negeri Faktor penghambat: Sekmentasi, SDM yang kurang, sarana prasarana, dan masyarakat yang kurang sadar akan adanya potensi wisata.</p>

2. Kerangka Teori

Menurut Sofian Efendi (1989) teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep dan definisi tertentu dan juga teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada kerangka dasar teori seorang peneliti dapat lebih memahami dan menganalisis suatu masalah agar menjadi suatu fokus penelitian.

1.6.Kerangka Teori

1.6.1. Peran Organisasi Pemerintahan

Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Menurut

Suryono Sukanto (2007) peran adalah aspek dinamisnya dari status organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Selain itu juga menurut Rivai (2006) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Peranan menurut Ralph Linton yang dikutip Bintoro (2016) mencakupi 3 hal utama yaitu:

- a. Peran adalah meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi organisasi dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing organisasi dalam masyarakat.
- b. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian konsep perihal apa yang dapat dilakukan organisasi dalam masyarakat.
- c. Peranan juga dapat dikaitkan sebagai perilaku organisasi yang penting bagi struktur sosial.

Organisasi merupakan kesatuan yang terdiri atas bagian- bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Untuk lebih jelas, dalam hal ini beberapa definisi yang menjadi titik tolak dalam uraian-uraian selanjutnya, yakni:

- a. Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama.
- b. Organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.
- c. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Dari pandangan di atas dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan tugas utama yang dilakukan organisasi sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah ditentukan dan dirumuskan.

Secara umum pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi peraturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurut Davey yang dikutip Fickyana (2013) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar

wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

1.6.2. Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Selain itu menurut Widodo (2002:40) dalam Kurianto (2012) menyatakan bahwa substansi isi kebijakan rencana pengembangan pariwisata nasional maupun daerah mencakup 5 aspek yaitu:

a. Aspek Produksi Wisata

Aspek produksi wisata merupakan aspek yang mempunyai beberapa pengaruh dan akibat terkait dengan keadaan ekonomi suatu kawasan pariwisata yang bisa dilihat dari dua indikator, yaitu transportasi yang lancar/pembangunan infrastruktur penunjang dan pemandu wisata.

b. Aspek Promosi/Pemasaran

Aspek promosi/pemasaran merupakan strategi mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara yang bisa dilihat dengan dua indikator, yaitu melalui platform destinasi wisata dan media sosial khusus pariwisata.

c. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan nonformal untuk bekerjasama demi

mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator aspek kelembagaan dapat dilihat dari kerjasama antar lembaga di bidang pariwisata dan transparansi informasi.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pemulihan citra pariwisata melalui kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian pariwisata. Dua indikator yang dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia ini yaitu pada menjaga kesadaran akan pentingnya pariwisata dan juga pelatihan ekonomi kreatif pada pelaku usaha wisata.

e. Aspek Spasial (Tata Ruang)

Aspek spasial merupakan aspek substansial dalam pembangunan citra pariwisata, penempatan infrastruktur penunjang akan mempengaruhi minat para wisatawan yang berkunjung bisa dilihat dari indikator penempatan infrastruktur pendukung dari obyek wisata tersebut.

1.6.3. Citra Wisata

a. Definisi Citra

Pengertian citra tidak dapat digambarkan atau diartikan karena citra itu sendiri abstrak akan tetapi wujudnya dapat dirasakan dan biasa disebut dengan citra yang sudah dibangun. Citra juga berupa pengalaman dan pengetahuan sebagai bentuk loyalitas maupun persepsi dari konsumen. Citra didefinisikan menurut Kotler (2012) sebagai sejumlah keyakinan tentang sebuah produk yang diciptakan atau dibuat. Citra yang dibuat harus bisa meyakinkan konsumen atau wisatawan dari segi rasa aman atau meyakinkan dari segi kualitas yang dijual berdasarkan pengalaman dan ilmu yang sudah dipelajari. Aaker (2012) menjelaskan citra juga berupa konsistensi dari penemuan yang diciptakan dan dipelihara secara terencana yang dapat menghadirkan rasa nyaman kepada wisatawan atau konsumen. Assael (2010)

mendefinisikan citra sebagai persepsi, untuk memunculkan persepsi yang dapat diterima wisatawan dan konsumen harus dibentuk dari berbagai informasi berdasarkan sesuatu yang memang terkenal dan memiliki keahlian di bidangnya. Croy (2014) memberikan penjelasan pentingnya citra bagi sebuah daerah tujuan wisata, menciptakan suatu harapan dari wisatawan yang berkaitan dengan kecemasan dan harapan yang diinginkan ketika berkunjung ke suatu daerah harapan ini menjadikan strategi pemasaran dan segmentasi pasar.

Ardianto (2014: 62-65) dalam bukunya menjelaskan bahwa citra adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi pedagang dan publik lainnya yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. Tugas perusahaan dalam membentuk citranya adalah dengan mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata publik atau masyarakatnya. Citra juga dapat diartikan sebagai kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan.

Keberhasilan perusahaan membangun citra dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yakni: citra dibangun berdasarkan orientasi terhadap manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan kelompok sasaran; manfaat yang ditonjolkan cukup realistis; citra yang ditonjolkan sesuai dengan kemampuan perusahaan; citra yang ditonjolkan mudah dimengerti oleh kelompok sasaran; citra yang ditonjolkan merupakan sarana, bukan tujuan usaha.

b. Element Citra Destinasi Wisata

Qu et al., (2011) dalam untuk dapat mengetahui hasil dalam mengukur cita destinasi wisata berdasarkan pada tiga elemen yaitu:

1. Citra Kognitif

Coban (2012) dapat menjelaskan keyakinan atau suatu informasi yang di miliki seseorang mengenai suatu destinasi. Penilaian pelanggan berdasarkan pada atribut yang di tampilkan, jaminan dari ide yang di buat berdasarkan standar dan pengalaman yang di temui sehingga konsumen dapat melakukan penilaian dan presepsi yang di ambil dapat memiliki manfaat yang baik. Apabila ideal maka semakin memiliki peluang besar kepuasan dari konsumen.

2. Citra Unik

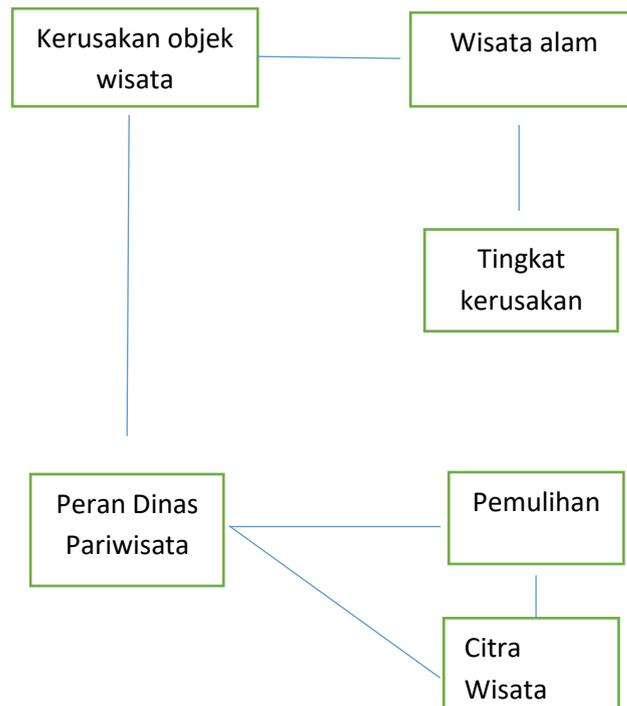
Sebagai destinasi yang memiliki penghasilan wisata yang besar harus memiliki citra yang unik yang dapat di kenal atau memiliki ciri khas yang dapat membedakan suatu daerah dari daerah yang lainnya. Keunikan itu menjadikan daya jual dan daya tarik dari untuk menjungi suatu daerah atau objek wisatanya.

3. Citra Efektif

Penilaian dari citra ini mengenai produk atau jaminan yang di berikan merupakan komponen yang paling efektif dari sikap tertentu penilaian yang di berikan dapat mempengaruhi daya kunjungan dan keinginan untuk mengulang memori yang telah di rasakan apakah secara spesifik memiliki kepuasan atau keengganan.

1.7.Kerangka Pikir Penelitian





1.8. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pengertian antara konsep suatu yang hendak akan di teliti. Berdasarkan judul yang tertera diatas yaitu peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara dalam pemulihan citra wisata alam pasca gempa bumi tahun 2018, maka penulis membagikan ke dalam konsep sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

3. Citra Wisata adalah suatu gambaran, kepercayaan, persepsi, dan pikiran dari para wisatawan terhadap suatu destinasi wisata yang melibatkan berbagai produk dan atribut destinasi wisata terkait.

1.9. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah sebuah petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diamati dan diukur, artinya dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan suatu penelitian dalam mengobservasi atau mengukur sehingga dapat menjadi contoh bagi orang lain.

- Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
 - a. Aspek Produksi Wisata dijabarkan dengan melihat infrastruktur transportasi apa saja yang menunjang destinasi wisata ke Lombok Utara serta *tour guide* yang menjadi pemandu bagi wisatawan yang berkunjung.
 - b. Aspek Promosi/Pemasaran dijabarkan dengan langkah pemerintah daerah untuk menarik minat wisatawan ke pariwisata Lombok Utara dengan memanfaatkan platform destinasi wisata serta media sosial khusus pariwisata
 - c. Aspek Kelembagaan dijabarkan dengan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Utara dan bagaimana transparansi informasi berkaitan dengan pendanaan pariwisata
 - d. Aspek Sumber Daya Manusia dijabarkan dengan bagaimana pemerintah daerah memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha wisata tentang pentingnya kesadaran untuk menjaga pariwisata dengan baik dan memberikan pelatihan ekonomi kreatif yang lebih menunjang daya tarik wisata.
 - e. Aspek Spasial dijabarkan dengan penempatan infrastruktur yang menjadi penunjang untuk mempengaruhi minat para wisatawan yang berkunjung.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2011:11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara merupakan lokasi yang sesuai dalam pelaksanaan penelitian, dikarenakan kabupaten ini merupakan kabupaten yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Potensi pariwisata pantai dan alam serta keanekaragaman budaya yang dimiliki daerah ini hancur akibat bencana gempa bumi pada tahun 2018 yang berakibat pada menurunnya minat wisatawan ke Lombok Utara.

1.10.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber:

a. Data Primer

Merupakan hasil data yang didapatkan melalui kata-kata yang diucapkan secara lisan/langsung, dan melalui perilaku yang dilakukan obyek.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisa terhadap

laporan, buku, website, jurnal, maupun literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan (Nazir, 2013). Laporan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini meliputi Profil Dinas Kabupaten Lombok Utara, Program Kerja Dinas Pariwisata, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata serta data-data yang menjadi penunjang dalam penelitian ini.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan menjawab secara lisan pula. Informan wawancara adalah:

1. Bapak Ainal Yakin (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara)
2. Bapak I Wayan Subada Iwandana (Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata)
3. Mas Anggi Samudra (Ketua Kelompok Sadar Wisata di Leong Timur)
4. Mas Rizal (Pelaku Pariwisata)
5. Pengunjung pariwisata Gili Trawangan

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa dokumen resmi, berupa arsip terkait dengan peran dinas pariwisata dalam pemulihan citra pasca gempa, seperti data sarana prasarana data jumlah pengunjung sebelum dan setelah gempa, rencana kerja dinas, dan lain sebagainya. Selanjutnya sebagai dokumentasi pribadi peneliti memiliki foto-foto tentang keadaan obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara.

1.10.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya di lingkungan Dinas pariwisata Kabupaten Lombok Utara serta kondisi alamiah di beberapa obyek wisata yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini data dianalisis menggunakan teknik model Moleong. Moleong (2011:138) menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam melakukan analisis data ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Setelah peneliti mendapatkan data berupa catatan lapangan, yang berupa hasil wawancara lalu peneliti memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan peneliti, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian peneliti susun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

b. Kategorisasi

Peneliti memilih-memilah setiap sesuatu dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Dalam setiap kategori yang diberi nama yang disebut label. Hal ini digunakan agar tidak tertukar dengan yang lainnya.

c. Sintesisasi

Setelah peneliti melakukan kategorisasi data, lalu peneliti akan mensintesisasikan antara satu kategori data yang didapat dengan yang lainnya agar mudah dipahami dan tidak tertukar.

d. Menyusun “Hipotesis kerja”

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pertanyaan yang proposional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori yang substantif (teori yang berasal dan berkaitan dengan data).